

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan. Salah satu perubahannya yaitu setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan organisasi milik pemerintah (termasuk Rumah Sakit dan Puskesmas) menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi. Berbeda dengan organisasi non pemerintah yang berbentuk yayasan tetap menggunakan PSAK 45 dalam menyajikan laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan akan selalu terkait dengan standar pelaporannya, dalam pelaporan keuangan organisasi milik pemerintah sangat terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diterapkan pada entitas yang berorientasi non pemerintah termasuk yayasan. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diperuntukkan bagi entitas yang berorientasi pada masyarakat.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yaitu : prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (8) Permendagri Nomor 64 Tahun

2013 yaitu : rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Tujuan akuntansi pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Disamping itu akuntansi juga merupakan suatu siklus, artinya akuntansi terdiri dari tahapantahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut.

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, maka pemerintah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya. Selain itu laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai evaluasi efisiensi, efektivitas, kegiatan operasional pemerintah, serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Artinya pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah kepada daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh

perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan potensi, kebutuhan serta karakteristik daerah itu sendiri.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kedudukan Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam PERBUP Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) yaitu dimulai dari semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum (lampiran 9). Dimana dalam Buku Kas Umum tersebut terdapat kolom tanggal transaksi, uraian, penerimaan, pengeluaran dan kolom saldo untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi. Kemudian Dinas Perkim membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Fungsional. Selanjutnya mendokumentasikan transaksi yang terjadi dan menjurnalnya. Transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas

dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan transaksi penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah instansi yang berkedudukan sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur teknis Pemerintah Kota Metro. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pekerjaan konstruksi khususnya bangunan dan gedung pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Metro . Basis akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA (laporan realisasi anggaran), belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO (laporan operasional) dan beban dalam neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Proses akuntansi pada Dinas Perkim Kota Metro adalah menyusun Buku Besar. Setelah buku besar, kemudian Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, selanjutnya membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang formatnya terdiri dari pendapatan daerah (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer), belanja daerah, belanja operasi (yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa), belanja modal (terdiri atas belanja peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya), Surplus/Defisit, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), (2) Laporan Posisi Keuangan (terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban dan ekuitas) (lampiran 1), (3) Laporan Operasional (terdiri atas Pendapatan; pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah; Beban, beban operasi,

beban transfer; Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; Pos Luar Biasa) (lampiran 2), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (terdiri atas Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, RKPPKD, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan, Ekuitas Akhir) (lampiran 4), (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (lampiran 10). Selanjutnya proses akuntansi yang dilakukan yaitu membuat Jurnal Penutup, kemudian membuat Neraca Saldo Setelah Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah. Laporan ini juga sebagai bukti komitmen mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data penerimaan dan pengeluaran kas selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Perumahan dan Kawansan Permukiman Kota Metro Tahun 2019-2022

No	Tahun	Penerimaan Kas (Rp)	Pengeluaran Kas (Rp)
1	2019	101.300.000	115.089.446
2	2020	136.900.000	139.035.267
3	2021	142.270.000	154.957.624
4	2022	149.520.000	158.317.546

Sumber: Data Sekunder (diolah 2023).

Pada Tabel 1 tampak bahwa setiap tahunnya penerimaan kas yang diperoleh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran kas yang digunakan. Pada tahun 2019 penerimaan kas sebesar Rp. 101.300.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 115.089.446. Tahun 2020 penerimaan kas sebesar Rp. 136.900.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 139.035.267. Pada Tahun 2021 penerimaan kas sebesar Rp. 142.270.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 154.957.624, sedangkan Tahun 2022 penerimaan kas sebesar 149.520.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 158.317.546. Terjadinya ketimpangan antara penerimaan dengan pengeluaran kas menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tidak mampu menyeimbangkan penerimaan dengan pengeluaran kas pada periode tertentu. Hal ini juga sekaligus membuktikan belum optimalnya pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak melakukan perhitungan rekonsiliasi bank pada setiap periode, sehingga tidak diketahui apakah terdapat perbedaan atau kekeliruan pencatatan antara akun kas pada Dinas dengan saldo kas yang dilaporkan bank. Selain itu Dinas Perkim juga tidak membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul : **Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut : Apakah Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro Telah Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

D. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi pemerintah daerah secara khususnya bagaimana penerapan akuntansi pemerintah daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- b. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan penerapan akuntansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan acuan bagi pihak lain yang bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian keuangan pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab dengan rincian masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Merupakan landasan teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi pengertian akuntansi, pengertian akuntansi pemerintahan, karakteristik akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, lingkungan akuntansi pemerintahan, periode pelaporan dan ketepatan waktu, pengungkapan-pengungkapan lainnya, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro , serta membahas tentang hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua hasil penelitian yang dilakukan.